

















1995.<sup>2</sup> Tapi semua usulan ke Badan Pembina Pahlawan itu tidak lolos, terbukti dari tidak adanya Keputusan Presiden tentang ini.

Bung Tomo benar-benar penuh kontroversi, meski belum dicantumkan dalam daftar pahlawan nasional, Bung Tomo yang terkenal dengan semboyan *rawe-rawe rantas malang-malang tuntas* (segala sesuatu yang merintangai maksud dan tujuan harus disingkirkan) yang membakar semangat para pejuang dalam pertempuran 10 November 1945 yang menewaskan Jenderal Mallaby. Peristiwa tersebut dan nama Bung Tomo diajarkan dalam buku sejarah resmi dalam kurikulum Depdiknas, dengan foto-foto Bung Tomo yang terpampang dalam buku-buku sejarah nasional.<sup>3</sup> Hal tersebut benar merupakan sesuatu yang kontras.

Saat Orde Lama, Bung Tomo pernah dikucilkan karena kekritisannya, lalu dia juga mengkritik beberapa kebijakan pemerintahan presiden Soekarno yang dianggap tidak pro rakyat. Kemudian pada Orde Baru, Bung Tomo sempat berseberangan dengan Soeharto yang menjabat Presiden waktu itu, karena sebagai sosok yang dekat dengan rakyat, Bung Tomo melihat sepak terjang Orde Baru samasekali tidak merakyat. Dia memiliki perbedaan pendapat dengan pemerintahan Orde Baru, kritiknya yang tajam dan berlebihan terhadap program-program Presiden Soeharto. Namun, kesemua gugatan yang bermakna kritik tajam yang dilontarkannya bukanlah untuk membesarkan namanya di kancah

---

<sup>2</sup>Ahmad Samantho, "*Gelar Pahlawan*" lihat juga, Joki Ananda "*Bung Tomo, setelah 63 tahun itu*" <http://www.jodyananda.com/article/bung-tomo-setelah-63-tahun-itu> (06 April 2009) 1.

<sup>3</sup>Oki Alvian "Pemerintah Memberikan Gelar Pahlawan Bagi Bung Tomo" <http://okialpian.blogspot.com/pemerintah-memberikan-gelar-pahlawan-bagi-bung-tomo/> (6 April 2009) 1.







menjadi pertanyaan adalah apakah seorang pahlawan dalam sikap dan pemikirannya juga searah dengan ideologinya?

Implikasi logis dari ideologi yang dimiliki oleh seseorang mampu mempengaruhi cara pandang dan sikap seorang yang menganut ideologi tersebut. Meskipun masih dipertanyakan, namun pada umumnya ideologi politik<sup>11</sup> digunakan untuk mencerminkan pandangan hidup atau sikap mental tertentu. Seorang pejuang yang sadar akan posisinya dalam suatu Negara harus mampu membedakan system yang berbeda-beda (*arbitrary system*) yang dikemukakan oleh intelektual dan filosof tertentu, dan ideologi organik yang bersifat historis (*historical organic ideologies*). Pendapat Gramsci, Yakni ideologi yang diperlukan dalam kondisi sosial tertentu:<sup>12</sup> sejauh ideologi itu secara historis diperlukan, ia mempunyai keabsahan yang bersifat psikologis: ideologi' mengatur' manusia, dan memberikan tempat bagi manusia untuk bergerak, mendapatkan kesadaran akan posisi mereka, perjuangan mereka, dan sebagainya.

Seorang pejuang Muslim sekalipun dalam mengekspresikan perjuangannya dalam bentuk yang nyata, pasti memiliki ideologi yang mendasarinya dalam bersikap. Sebuah keniscayaan bahwa perjuangan yang tidak disertai ideologi di dalamnya kelihatan bahwa upaya-upaya yang diperjuangkannya tidak banyak

---

<sup>11</sup> Ardial, *Komunikasi Politik* (Jakarta: PT Indeks, 2010) 31.

<sup>12</sup> Roger Simon, *Gagasan-Agasan Politik Gramsci*, Diterjemahkan Kamdani Dan Imam Baehaqi (Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset, 1999) 83. Lihat juga, Faisal Baasir, *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003) 171-172.



melahirkan kesuksesan. Diantara contohnya adalah pengalaman gerakan *counter culture* kaum muda di Perancis tahun 1968 dan di Amerika pada tahun 1969.<sup>13</sup>

Ali Syari'ati,<sup>14</sup> menandakan bahwa Ideologilah yang senantiasa mengilhami dan memimpin serta mengorganisasi perjuangan peperangan, pemberontakan dan pengorbanan yang luar biasa sepanjang sejarah kemanusiaan. Sifat dan keharusan ideologi meliputi keyakinan, tanggung jawab, keterlibatan dan komitmen. Jelas bahwa Ideologi mampu menghantarkan seseorang menjadi seorang pahlawan.

Pahlawan sendiri merupakan perbuatan yang dilakukan secara sadar dan mengandung resiko bahkan mengorbankan jiwa dan raga dalam perjuangan mencapai cita-cita luhur bangsa, yakni kemerdekaan dan kedaulatan menuju masyarakat adil dan makmur, baik melalui perjuangan bersenjata/fisik maupun perjuangan nonfisik, antara lain di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Menurut Mannheim,<sup>15</sup> Ideologi merupakan ramalan akan masa depan yang berdasarkan sistem yang sekarang sedang berlaku. Hal ini jelas telah melekat pada Bung Tomo dalam gugatannya yang berisi kritikan atas realitas sosial yang ada pada masanya, baik keritikanya pada era Orde Lama ataupun Orde Baru lengkap dengan solusi yang ditawarkannya. Artinya Bung Tomo mencoba melihat masa depan bangsa dengan sudut pandangnya. Mannheim menambahkan ada

---

<sup>13</sup> Faisal Baasir, *Etika Politik*, 170.

<sup>14</sup> Ali Syari'ati, *Ideologi Kaum Intelektual: Satu Wawasan Islam*, Diterjemakan Farid Gaban (Bandung: Mizan, 1994) 78.

<sup>15</sup> Karl Mennheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, Diterjemahkan F. Budi Hardiman (Jogjakarta: Penerbit Kanisus, 1991) 211-215.





menunjukkan eksistensinya sebagai bangsa dan negara yang berdaulat dan anti penjajahan.

Keselarasannya dan konsistensinya Bung Tomo dalam mengaplikasikan ide-ide politiknya menjadi kajian yang penting. Hal ini untuk mengungkap apakah ideologi politik yang dianutnya menjadi landasan dasar bagi pemikiran dan sikap politiknya. Dan menjadikan Bung Tomo layak untuk disebut juga sebagai penganut ideologi politik sosialis-religius. Mengingat dia adalah seorang Muslim yang taat, hal ini bisa dilihat dari betapa setiap dia melontarkan takbir ketika mengobarkan semangat juang pemuda Surabaya saat pertempuran 10 November 1945. Dan ketaatannya sebagai seorang Muslim, hingga meninggalnya di Arafah tanah suci, ketika sedang wukuf sewaktu menunaikan ibadah haji, pada tanggal 7 Oktober 1981.<sup>21</sup> Dengan melihat lebih jauh dan menilai eksistensi dan konsistensi perjuangan Bung Tomo, bisa digunakan untuk menelusuri dan menilai perjalanan sejarah bangsa sejak 1955 hingga 1980.

## **B. Rumusan Masalah**

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian diformulasikan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ideologi politik Bung Tomo?

---

<sup>21</sup>Hamdy L. Gumanti (Penyunting), *Selamat Jalan Bung Tomo* (Jakarta: Aksara Agung, 1982) 14.

2. Bagaimana ideologi politik itu mendasari pemikiran dan sikap politik Bung Tomo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berpijak pada rumusan masalah di atas, maka diformulasikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan arah ideologi politik Bung Tomo
2. Untuk mendeskripsikan sejauh mana ideologi politik itu mempengaruhi pemikiran dan sikap Bung Tomo sebagai pejuang.

### **D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Dari segi teoritis penelitian ini merupakan kegiatan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya wacana politik, pemikiran dan pergerakan intelektual Muslim.

Dalam segi praktis hasil dari penelitian ini dapat diharapkan mampu memahami dengan jelas tentang wacana hubungan pemikiran, sikap dan perjuangan seorang Muslim dalam penempatan dirinya dengan ideologi yang dianut.

### E. Penegasan Judul

Judul dalam penelitian ini adalah **IDEOLOGI POLITIK BUNG TOMO**” Untuk menjelaskan jalannya maka perlu ada batasan operasional agar orang lain yang berkepentingan dalam penelitian tidak keluar dari pembahasan yang seharusnya:

1. Ideologi : Sesuatu yang dipakai untuk menunjukan kelompok ide-ide yang teratur mengenai bermacam-macam masalah politik, ekonomi dan sosial: asas haluan pandangan hidup.<sup>22</sup>
2. Ideologi politik : Himpunan nilai, ide, norma, kepercayaan, dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang menjadi dasar dalam menentukan sikap terhadap kejadian dan problem politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politik.<sup>23</sup>
3. Bung Tomo : Pahlawan Nasional Berasal dari Kota Surabaya dan terkenal dalam peranya dalam Pertempuran 10 November 1945. Bukan Dr Sutomo pendiri Budi Utomo 1908.

---

<sup>22</sup> Pius A. Partanto, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994) 239.

<sup>23</sup> Ibid.

## F. Telaah Pustaka

Untuk menjadi bahan telaah dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan buku-buku, artikel-artikel atau catatan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan judul skripsi. Diantara buku-buku yang menjadi bahan telaah adalah:

1. Hamdy El Gumanti (penyunting), *Selamat Jalan Bung Tomo*, Jakarta: Aksara Agung, cet I, 1982. Mengulas perjalanan dan pengalaman spiritual sebagai seorang Muslim dan mengulas falsafah Allahu Akbar dalam perspektif Bung Tomo sekaligus perjalanan hidup hingga akhir hayatnya.
2. Sulistina Sutomo, *Bung Tomo Suamiku: Biara Rakyat yang Menilai Kepahlawananmu*, Jakarta: Visimedia, cet II, 2008. Berisi tentang perjalanan hidup Bung Tomo sebagai sosok pahlawan bagi keluarga dan Negeri ini.
3. Anthoni Sina, Zaenal Lutfi dan Agus Setiawan “*Menapak Jalan Panjang Kaum Muda*” Artikel di Matan Edisi 12 juli 2007 hal 6-9. Mendeskripsikan betapa kobaran arek-arek Suroboyo menggetarkan dunia. Memotret ideologi yang dipahat oleh semangat yang dikibarkan oleh agitator Surabaya Bung Tomo sebagai telaah ideologi bagi perjuangan kaum muda pada dewasa ini.

4. Ahmad Samantho, “*Gelar Pahlawan Untuk Bung Tomo dan Muhammad Natsir*” dalam harian Tempo, kolom Opini, 10 November 2008, dan dari webside pribadi Ahmad Sumantho, <http://icasjakarta.wordpress.com/2008/11/12/gelar-pahlawan-untuk-bung-tomo-dan-muhammad-natsir/>. Memaparkan bagaimana seorang Bung Tomo layak untuk diangkat sebagai seorang Pahlawan dengan segala perjuangan yang sudah dilakukan untuk negeri ini.
5. A. Radjib, *Pelajar Dan Perang Kemerdekaan*, Yogyakarta: Penerbit yayasan widoro, 1997. Mendeskripsikan tentang perjalanan kota Surabaya paska kemerdekaan mulai dari inspeksi BKR Darmo 49 Surabaya. Beserta semangat juang para pemuda dan tokoh Surabaya melawan tentara Inggris, tak terkecuali Bung Tomo. Hingga perang kolonial I dan II.
6. Soejipto Hardjosoediro, *Dari Proklamasi ke Perang Kemerdekaan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1987. Mendeskripsikan tentang peristiwa-peristiwa politik dan kiprah pahlawan bangsa selama zaman revolusi fisik. Semua kejadian yang dipaparkan mengandung kenyataan sejarah. Buku ini berisi perjalanan bangsa dari penjajahan Belanda akhir tanggal 8 Maret 1942 hingga peran penerangan menjelang dann sesudah kedaulatan RI.





### 3. Sumber Data Primer:

Sumber data primer, yang dipakai yaitu: karya- karya Bung Tomo, baik berbentuk buku, artikel, maupun kumpulan pidato Bung Tomo, diantaranya:

- a. Bung Tomo (Sutomo), *Pertempuran 10 November 1945 : kesaksian dan pengalaman seorang Aktor Sejarah*, Jakarta: Visimedia, Cet II, 2008.
- b. Bung Tomo (Sutomo), *Menembus Kabut Gelap, Bung Tomo Menggugat: Pemikiran, Surat, dan Artikel Politik (1955-1980)*, Jakarta: Visimedia, cet II, 2008.
- c. Kepingan CD Pidato Bung Tomo saat menyemangati Arek-arek Surabaya menjelang pertempuran 10 November 1945.

### 4. Sumber Data Skunder:

Data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, baik berupa buku-buku, artikel-artikel, yang menunjang atau dokumen tertulis lainnya seperti:

- a. *Buku Pintar Politik: Sejarah, pemerintahan dan ketatanegaraan*, Redaksi Great Publisher, Great Publisher, 2009.
- b. *Sistem Politik Indonesia: Era Soekarno, Hatta, Syhrir, Adit, Syafrudin, Era Soeharto, Moerdani, Wiranto, Harmoko, Habibie, Gus Dur, megawati, Amin Rais, Hamzah Haz, Susilo Bambang*

- Yudoyono, Yusuf Kalla dan Baasyir. Inu Kencana Syarif dan Azhari, PT. Reflika Aditama, 2009.*
- c. *Membincangkan Tokoh-Tokoh Bangsa : Soekarno, Hamka Bey Arifin, Syutan Takdir Alisyabana, Mohammad Natsir, Muhammad Yamin, Anwar Harjono, Mohammad Hatta, Zarkasyi, Tjokoraminoto, Harun Nasution, Sjahrir, Wahab Casbullah, Agus Salim, Sjafruddin Prawiranegara, Deliar Noer, Mizan Pustaka Kronik Indonesia Baru, 2001*
- d. *Sistem Politik Islam: Sebuah Pengantar, karya Sayid Muhammad Baqir Ash-Shadar., Penerbit Lentera, 2009.*
- e. *Islam dan Politik: Mungkinkah Bersatu?, karya Abu Ridha, Syaamil Cipta Media, 2004.*
- f. *Budaya Indonesia: Kajian Aerkologi, Seni dan Sejarah. Karya Edi Sedyawati, PT. Radja Grafindo Persada, 2006.*
- g. *Komunikasi Politik, karya Ardial, PT Indeks, 2009.*

## **H. Analisis Data**

Unit analisis penelitian ini adalah individu yang terfokus pada domain pemikiran. Individu yang dimaksud adalah seorang intelektual muslim dan pejuang bangsa Asal kota Surabaya yakni Sutomo (Bung Tomo), sedangkan



menelusuri tema yang tersebar. Setiap data yang diperoleh disilang melalui sumber data yang berbeda untuk menggali informasi secara mendalam dan akurat.

3. Penyajian data, yaitu merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang pada mulanya terpancar dan terpisah menurut sumber informasi dan saat diperolehnya informasi tersebut. Kemudian, data diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan.
4. Menarik kesimpulan dan verifikasi data berdasarkan reduksi, interpretasi dan penyajian data yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dari hal-hal yang khusus (spesifik) sampai kepada rumusan simpulan yang sifatnya umum (general).

Keempat tahapan diatas merupakan satu kesatuan pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Hal ini digambarkan melalui bagan sebagai berikut:





## BAB II

### HUBUNGAN IDEOLOGI DAN SIKAP POLITIK

#### A. Pengertian Ideologi

Ideologi kali pertama dikenalkan oleh Antoine Dessutt de Tracy tahun 1976 di Perancis sebagai *science of ideas, the study of origins, evolution and nature of ideas*.<sup>1</sup> Ideologi diartikan sebagai ilmu tentang pikiran manusia yang mampu menunjukkan arah yang benar menuju masa depan. Semula ideologi adalah ilmu seperti juga biologi, psikologi, fisika dll.

Ideologi seiring dengan perkembangan zaman telah mengalami perubahan yang luar biasa dalam penafsirannya. Terlihat dari beberapa pengertian tentang ideologi yang dikemukakan oleh beberapa intelektual mengenai pengertian ideologi. Hal mana tidak bisa dilihat secara sepihak, karena banyak aspek yang menjadi pijakan berbeda dalam pendefinisian ideologi tersebut.

Sebut saja Karl Max yang memiliki pandangan terhadap ideologi sebagaimana dia mengatakan bahwa: *as ideological any set of political illusions that have been produced by the social experience of a class. Thus, it would be almost impossible for an individual class member to form an accurate conception of world* (setiap rangkaian-khayalan politis yang telah dihasilkan oleh

---

<sup>1</sup> Dikutip dari Slamet Sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006) 24-25. Lihat juga, Jorge Larrain, *Konsep Ideologi*, Diterjemahkan Oleh Ryadi Gunawan (Yogyakarta: LKPSM, 1996) 7. Lihat juga David Mc Lelland, *Ideologi Tanpa Akhir*, Diterjemahkan Oleh Muhammad Syukuri (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005) 8-9.







Pandangannya atas ideologi menunjukkan adanya pemisahan dan ideologi yang bersifat arbiter dimungkinkan adanya kesadaran palsu, sedangkan pada pengertian ideologi yang kedua, yang organis tidak mungkin akan terjadi kesadaran palsu. Gramsci menandakan bahwa ideologi organis bersifat netral sebagai suatu konsepsi tentang dunia yang secara implisit dimanifestasikan ke dalam kesenian, hukum, kegiatan ekonomi, dan semua manifestasi individual maupun kolektif.<sup>10</sup>

Pengertian ideologi berkembang menjadi pengertian yang mengandung arti sebagai gagasan, ide-ide yang semula merupakan sasaran pengkajian dalam *science of ideas* Tracy. Selanjutnya ideologi bukan hanya mengandung pengertian sebagai gagasan atau pemikiran, melainkan sebagai keyakinan. Hal ini menunjukan bahwa ideologi menjadi titik pijak dari semula yang hanya menjadi sistim kognitif kemudian sekaligus mencakup sistim normatif yang berorientasi nilai-nilai etika. Dalam cakupan nilai-nilai itulah ideologi menjadi *belief system*.

Ideologi menurut Ali Syari'ati dijabarkan menurut katanya, dimana ideologi terdiri dari kata "ideo" yang berarti pemikiran, gagasan, konsep, dll. Kemudian "logi" yang berarti logika, ilmu, atau pengetahuan sehingga ideologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang keyakinanana dan cita-cita. Menurut pengertian ini seorang ideologi haruslah adalah seorang pembela suatu ideologi atau

---

<sup>10</sup> Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, Ditetjemahkan Oleh Kamdani dan Imam Baehaqi (Yogyakarta: Insist Press bersama Pustaka Pelajar, 1999) 83-85. Lihat juga, Peter Beilharz, *Teori-teori Sosial: Observasi Kritis Terhadap Para Filusuf Terkemuka*, Diterjemahkan Oleh Sigit Jatmiko (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) 207.

keyakinan tertentu. Dalam kaitan ini ideologi terdiri dari berbagai keyakinan dan cita-cita yang dipeluk oleh suatu kelompok tertentu, satu kelas sosial atau suatu bangsa.<sup>11</sup>

Ideologi berisi tatanan nilai yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pedoman untuk menjalankan kehidupan bersama dalam rangka meraih harapan-harapan yang dicita-citakan bersama. Tatanan nilai yang kemudian membentuk ideologi tersebut dapat berasal dari adat istiadat dan dapat pula bersumber dari suatu ajaran agama, atau merupakan gabungan keduanya. Fungsi dari ideologi ini adalah sebagai referensi konseptual yang memberikan koherensi pada aksi politik. Ideologi memainkan peranan dalam melekatkan hubungan pola pikir dan tingkah laku. *Political Ideology is an application of particular moral perceptions to collectivities* (Ideologi Politik adalah suatu aplikasi atas persepsi moral tertentu secara keseluruhan)

## **B. Ideologi Politik**

Ideologi politik mencakup perilaku yang didasari sebuah nilai atau norma yang kemudian mempengaruhi pelaku-pelaku politik dalam ekspresi-ekspresi ideologisnya. Selain itu, ideologi politik juga merupakan kegiatan dalam aspirasi yang memiliki implikasi terhadap sikap dan tindakan pelaku politik. Ideologi politik pun bisa digunakan untuk mempengaruhi para penguasa kebijakan dalam

---

<sup>11</sup> Ali Syari'ati, *Tugas Cendekiawan Muslim*, Diterjemahkan oleh Amin Rais (Jakarta: Lentera, 1996) 156-157.











serta merta dengan adanya kesamaan misi perjuangan, unifikasi yang digagas Soekarno atau *hand together* yang diinginkan Tan Malaka itu terwujud. Inilah kenapa sejarah pada akhirnya tidak "linier" dan "sebangun". Sejarah tidak menjadi satu kesatuan aksi dan gerak karena memang kenyataan menunjukkan bahwa garis ideologi politik yang berbeda melahirkan aksi-aksi yang bersifat politik pun berbeda. Sehingga jejak sejarah yang terekam dikemudian hari menunjukkan jejak sejarah yang "komplek", "tidak linier", dan "tidak berdiri sendiri".

Yang akan dibahas dalam hal ini adalah pengertian ideologi politik yang ada dalam mencapai apa yang dicita-citakan bersama. Dan melihat lintas sejar yang ada di Indonesia maka setidaknya ada tiga arus yang mempengaruhi perkembangan ideologi politik nusantara. Hal ini bisa dilihat dari tiga pergulatan besar, diantaranya antara isu nasionalisme yang bebas dari Agama, Islam dan Sosialisme atau marxis. Ketiga ideologi tersebut yang akan dibahas lebih lanjut.

## **1. Nasionalisme**

Nasionalisme berasal dari kata *nation* yang berarti bangsa atau kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara. Pada abad ke-18 kata "*nation*" menjadi lebih luas artinya setelah Parlemen Revolusi Prancis menyebut diri mereka sebagai "*assemblee nationale*" yang menandai transformasi institusi politik tersebut, dari sifat eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi kaum







nasionalisme abad ke 15, ketika reformasi Protestan yang menandai *nation state* di Eropa, termasuk nasionalisme Jerman ketika pengaruh “kapitalisme cetak” yang dipelopori Johann Gothenberg yang menerjemahkan Alkitab kedalam bahasa Jerman serta otoritas Politik Paus “dilucuti” sehingga tinggal menyisihkan otoritas relijius semata.<sup>24</sup>

Berkembangnya paham liberalisme selepas Gerakan Reformasi Protestan kemudian berjalan seiring dengan perkembangan nasionalisme. Nasionalisme Inggris, kemudian diikuti munculnya nasionalisme di Amerika dan Revolusi Perancis. Ataupun Nasionalisme ala Napoleon Bonaparte di Perancis yang lebih kepada nasionalisme imprealistik. Di Jerman Nasionalisme lebih mengedepankan Pan-Jermanisme sekaligus anti Semitisme. Tujuannya adalah mengumpulkan semua orang dari Nasionalitas Jerman dan semua kawasan Eropa bersama-sama dalam satu Negara dimana ansir Jerman mendominasi, paling tidak menurut jumlahnya baru kemudian secara politik ekonomi dan/kultural.<sup>25</sup> Dan juga bukan nasionalisme yang di rumuskan oleh Hitle, di mana Nasionalisme diartikan sebagai tanah dan daerah (*Eine Nation von Boden und Blut*).<sup>26</sup>

Jelas ideologi nasionalis yang tumbuh berkembang di Nusantara berbeda dengan pengertian dan pemahaman nasionalisme ala Barat. Ideologi nasionalis

---

<sup>24</sup> Adhyaksa Dault, *Islam dan Nasionalisme*, 5.

<sup>25</sup> Michael A. Riff, *Kamus Ideologi Politik Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995) 202.

<sup>26</sup> Artinya semua yang sedarah dengan Jerman, dari ras Aria, adalah bangsa Jerman. Semua yang setanah dengan adalah Jerman dan semuanya adalah “kolektivitas politik” yang harus dibawah *ein Futher*, satu pemimpin, yaitu Hitler sendiri. Lihat, Adhyaksa Dault, *Islam dan Nasionalisme*, 7.

merupakan sebuah semangat sekelompok manusia yang hendak membangun suatu bangsa yang mandiri, dilandasi satu jiwa dan kesetiakawanan yang besar, mempunyai kehendak untuk bersatu dan terus menerus ditingkatkan untuk ersatu, dan menciptakan keadilan dan kebersamaan. Hasrat bersama itu merupakan solidaritas yang agung. Menurut Ernest Renan, Nasionalisme sebagai *Le Desire d'entre ensemble* (kehendak untuk bersatu).

## **2. Islam (Religius)**

Religius telah menjadi ciri tersendiri bagi Indonesia. Sejak awal sejarah perkembangan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia sudah menganut politeisme. Politeisme secara harfiah berasal dari bahasa Yunani *poly* dan *theoi* yang berarti banyak Tuhan. Politeisme sebagai sebuah bentuk kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan merupakan penjelasan bagi kegandrungan banyak masyarakat Indonesia hingga saat ini terhadap hal-hal yang berbau klenik, mistis dan ghaib.

Pada perjalanan sejarah selanjutnya Islam menjadi agama terbesar yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Sebagai sebuah agama yang memiliki konsep holistik, maka pembicaraan tentang pandangan hidup masyarakat Indonesia tidak dapat lepas dari ideologi Islam.

Ideologi keagamaan pada hakikatnya memiliki perspektif dan tujuan yang berbeda dengan ideologi liberalisme dan komunisme. Sebenarnya sangat

sulit untuk menentukan tipologi ideologi keagamaan, karena sangat banyak dan beraneka ragamnya wujud, gerak dan tujuan dari ideologi tersebut.

Namun secara keseluruhan terdapat suatu ciri bahwa ideologi keagamaan senantiasa mendasarkan pemikiran, cita-cita serta moralnya pada suatu ajaran agama tertentu. Gerakan-gerakan politik yang mendasar pada suatu ideologi keagamaan lazimnya sebagai suatu reaksi atas ketidakadilan, penindasan, serta pemaksaan terhadap suatu bangsa, etnis, ataupun kelompok yang mendasarkan pada suatu agama.

Di Indonesia Islam memegang peranan yang penting untuk dijadikan pijakan ideologi politik. Sebagaimana dikutip Faisal, menurut George Mc Turner Kahin bahwa Islam yang disebut dengan istilah agama Muhammad bukan hanya merupakan mata rantai yang mengikat persatuan melainkan juga merupakan symbol persamaan nasib (*in group*) menentang penjajahan asing dan penindasan dari agama lain.<sup>27</sup>

Setali dengan Turner, Fred R Von. Der Mehden sebagaimana dikutip oleh Bahtiar Effendy bahwa Islam merupakan sarana yang paling jelas, baik untuk membangun rasa persatuan nasional maupun untuk membedakan masyarakat Indonesia dari kaum penjajahan Belanda. Dengan tegas Mehden mengatakan

---

<sup>27</sup> Faisal Ismail, *Ideologi dan Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999) 50.



tahun 1912. Dalam awal perkembangannya organisasi ini memainkan peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Kemudian tahun 1930 diubah lagi namanya menjadi PSII (Partai Serikat Islam Indonesia). Gerakan ini menjadi organisasi politik pertama yang memelopori program politik nasional dibawah kepemimpinan Agus Salim, H.O.S Tjokroaminoto dan Abdoel Moeis yang mendapat dukungan dari semua kelompok masyarakat luas baik di kota maupun pelosok-pelosok desa. Kemudian pada gilirannya gerakan politik ini berpijak pada ideologi Islam sebagai pacuan untuk bergerak.<sup>31</sup>

Dalam pandangan kelompok Nasionalis-Muslim, tempat Islam dalam Indonesia merdeka harus mendapatkan dasar konstitusional yang jelas sesuai dengan aspirasi politik dan agama umat Islam, karena umat Islam merupakan 90 persen dari penduduk Indonesia tahun 1945.<sup>32</sup>

Secara umum, pemikiran politik Muslim Modern mengenai hubungan antara agama dan Negara dapat diklasifikasikan kedalam tiga teori utama. Pertama berpendapat bahwa Negara dan agama tidak harus dipisahkan, karena Islam sebagai agama yang integral dan progressif mengatur baik kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Menurut pandangan ini, tidak ada aspek dari aktivitas keseharian umat Islam, termasuk dalam pengelolaan Negara, dapat dipisahkan dari Negara.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Ibid., 6.

<sup>32</sup> Alfian, *Politik Kebudayaan dan*. 46.

<sup>33</sup> Masdar F. Mas'ud, Islam dan Negara kebangsaan dalam *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia* (Bandung Pustaka Hidayah, 1999) 69-75.



para ideology lain dari Ikhwan al –Muslimin dari Mesir. Pembelaan mereka atas kesatuan agama dan Negara dierminkan dalam politik dimana Islam adalah “*al-din wa al-daulah*” (agama dan Negara)

Sedang teori yang kedua, biasa disebut dengan paradigim simbiotik yang menginginkan pemisahan atara urusan dan agama terbatas atas urusan-urusan pribadi. Harus tidak ada campur tangan dalam hal politik dan konstitusi Negara tidak harus didasarkan atas Islam. Antara agama dan Negara merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan. Oleh karenanya, konstitusi yang berlaku dalam paradigim ini tidak saja berasal dari adanya *social contract*, tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum agama (*syari'at*).<sup>38</sup>

Ketiga adalah menginginkan *disparatis* antara agama dan Negara secara resmi. Menerut konsep ini agama dan Negara merupakan dua entitas yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing. Sehingga keberadaanya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervesnsi.<sup>39</sup>

Islam dalam perkembanganya menjadi suatu yang esensial dalam meneguhkan sebhuh identitas dan cenderung dianggap sebagai suatu ideologi. Dalam Islam ada pemusatan dalam kerangka ideologinya, merupakan fenomena yang bisa terjadi pada setiap tradisi keagamaan. Dalam Islam juga demikian,

---

menjatuhkan rezim. Qutb menulis banyak karya diantaranya adalah *Nahwu Mutjama' Islami, Khasis al-Tasawwur al-Islami wa maqawwamatuhu*, dan *Hadha al-Din*.

<sup>38</sup> Dede Rosyadi dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan*, 63.

<sup>39</sup> Ibid.





oposisi. Dalam perkembangan kemudian, revolusi muncul yang berhasil mengakhiri kekuasaan Syah Iran.<sup>43</sup>

*Ketiga*, Sunni revolusioner (*revolutionary sunni*). Disebut dengan sunni revolusioner karena gerakan ini dirintis oleh imam-imam besar dari kalangan sunni seperti Ibn Hanbal, Ibn Hazm, nawawi, Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, Ibn Khatir dan Ibn Abd al-Wahab. Para imam ini, menurut Dekmejian mempunyai komitmen terhadap pembaharuan umat dengan kembali pada akar-akar Islam; advokasi, militansi, dan jihat dalam mempertahankan Islam; dan kesiapan dalam menghadapi otoritas keagamaan dan politik, serta keadaan menderita mempertahankan keyakinan agama mereka.

*Keempat*, mesianis primitive (*messianic-primitivist*). Gerakan dalam kategori ini disebut oleh Dekmejian sebagai gerakan yang paling puritan dengan berusaha mencontoh kehidupan nabi dan bentuk kehidupan kumunitas Islam pertama serta menentang berbagai bentuk inovasi (pembaharuan) atau usaha-usaha beradaptasi dengan kondisi-kondisi modern.

Keempat kategori orientasi ideologi gerakan Islam serta kelompok-kelompok yang ada di dalamnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

#### Taksonomi Ideologi Kelompok Islam<sup>44</sup>

Orientasi ideologi	Gerakan Islam
--------------------	---------------

<sup>43</sup> A. Rahman Zainuddin dan M. Hamdan Basyar (editor), *Syi'ah Dan Politik Di Indonesia: Sebuah Penelitian* (Bandung: Mizan, 2000) 46.

<sup>44</sup> Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praksis Gerakan*, 50.



Gradualist-adaptasionist	Ikhwan al-Muslimin (Mesir, Irak, Negara-negara Teluk, Sudan, Yordania, Afrika Utara) Jama'at Islam (Pakistan)
Syi'ah-revolusioner	Partai Republik Islam (Iran) Hizb al-Dakwah (Irak) Hizbullah (Libanon) Jih ad al-Islami (Libanon)
Sunni-Revolusioner	Al Jih ad (Mesir) Orgaisasi Pembebasan Islam (Mesir) Ikhwan al-Muslimin (Suriah) Hizb al Tahrir (Yordania, Suriah)
Mesianis-primitif	Al-Ikhwan (Saudi Arabia) Takfir wa al-Hijjah (Mesir) Mahdiyyah (Sudan) Jama'at al-Muslimin li al-takafir (Mesir)

### 3. Marxis

Sosialisme (*sosialism*) secara etimologi berasal dari bahasa Perancis sosial yang berarti kemasyarakatan. Istilah sosialisme pertama kali muncul di Perancis sekitar 1830. Umumnya sebutan itu dikenakan bagi aliran yang masing-masing hendak mewujudkan masyarakat yang berdasarkan hak milik bersama terhadap alat-alat produksi, dengan maksud agar produksi tidak lagi diselenggarakan oleh orang-orang atau lembaga perorangan atau swasta yang hanya memperoleh laba



(1848). Dalam edisi bahasa Inggris 1888 Marx memakai istilah “sosialisme” dan “komunisme” secara bergantian dalam pengertian yang sama. Hal ini dilakukan sebab Marx ingin membedakan teorinya yang disebut “sosialisme ilmiah” dari “sosialisme utopia” untuk menghindari kekaburan istilah dua sosialisme dan juga karena latarbelakang sejarahnya. Marx memakai istilah “komunisme” sebagai ganti “sosialisme” agar nampak lebih bersifat revolusioner

Paham Marxisme pada mulanya berkembang diluar gerakan kebangsaan pribumi yakni partai Nasional Hindia Belanda (NIP, *Nationale Indische Partij*) yang merupakan organisasi politik Eropa-Indonesia lahir tahun 1912 menyeruhkan faham kesetaraan ras keadilan sosial- ekonomi dan kemerdekaan yang dilandaskan atas kerjasama Eropa-Indonesia. Seruan-seruan politik nasionalisme-NIP, mendapatkan respon dari pemerintahana colonial dengan cara melakukan tindakan-tindakan keras terhadap aktivitas organisasi tersebut. Sehingga, kelompok minoritas dalam NIP menggabungkan diri dengan partai beraliran kiri (ISDV, *Indische Sociaal Democratische vereeninging*) pada 1914 oleh Hendrik Sneevilt seorang mantan aktivis Partai Buruh demokrasi Liberal di Belanda. Sneevilt datang ke Indonesia setahun sebelum mendirikan partai tersebut ISDV kemudia menjadi cikal bakal terbentuknya partai komunis Indonesia yang sepenuhnya beraliran komunis, yang didirikan oleh Semuan dan Darsono.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan* (Yogyakarta: LKiS, 2008) 167.









## Model Cara Kerja Ideologi

Model Umum	Bentuk Strategi Konstruksi Simbol
Legitimasi	Rasionalisasi Universalisasi Narativisasi
Penipuan	Pemindahan Eufemisasi Kiasan (Sinekdoch, Metonomoni, Metafor)
Unifikasi	Standarisasi Simbolisasi dan kesatuan
Fragmentasi	Diferensiasi Ekspurgasi yang lain
Reifikasi	Naturalisasi Eternalisasi Nominalisasi

Legitimasi menurut Thomson berbeda dengan legitimasi Marx yang mendefinisikan legitimasi dengan kepatutan dan kelayakan dukungan. Legitimasi bisa digunakan oleh seseorang menurut Thomson untuk melakukan relasi dominasi apabila memiliki klaim legitimasi yang bersumber dari tiga latar belakang utama yaitu; Rasional, tradisional, dan kharismatik. Rasional diperoleh melalui aturan-aturan tertentu. legitimasi tradisional didasarkan pada kesucian tradisi sedangkan kharisma didasarkan pada karakter individu yang memiliki otoritas. Untuk mengungkapkan tiga bentuk strategi tersebut menggunakan tiga bentuk konstruksi simbol.

Strategi pertama menggunakan rasionalisasi yakni, dengan cara mengkonstruksi serangkaian pemikiran yang berusaha mempertahankan dan menjustifikasi seperangkat relasi atau institusi sosial agar memperoleh dukungan yang sepatutnya. Strategi lainnya melalui universalisasi. Dengan strategi ini,

institusi yang dibangun untuk kepentingan kelompok tertentu dikatakan sebagai melayani kepentingan semua (umum), dan bentuk institusi semacam itu juga dikatakan terbuka bagi siapa saja yang memiliki kemampuan dan kecenderungan untuk terlibat di dalamnya. Strategi berikutnya, narativisasi. Strategi ini berbentuk pengungkapan kembali cerita-cerita masa lalu yang harus dihargai terus-menerus. Kadang-kadang cerita tentang masa lalu penuh dengan rekayasa agar kekuasaan memperoleh justifikasi.

Cara kerja ideologi yang kedua adalah penipuan (*dissimulation*). Dalam strategi ini relasi dominasi terus dipelihara dan diawetkan dengan cara disembunyikan, diingkari, dikaburkan atau dihindarkan dengan cara mengalihkan perhatian dari atau memberikan penjelasan terhadap relasi atau proses yang sedang berlangsung. Setidaknya ada tiga cara untuk mengekspresikan strategi penipuan ini. Yang pertama melakukan penggantian (*displacement*) konotasi positif atau negatif dalam individu yang lain.

Berikutnya dengan menggunakan eufemisasi atau tindakan atau relasi yang sebenarnya bermakna negatif direkayasa sedemikian rupa sehingga memperoleh pemaknaan positif dari individu yang satu ke individu yang lain. Berikutnya dengan menggunakan eufemisasi suatu tindakan atau relasi sosial sebenarnya bermakna negatif direkayasa sedemikian rupa sehingga bermakna positif. Terakhir menggunakan berbagai macam perlambangan untuk

menyembunyikan relasi dominasi. Strategi kiasan ini biasanya diekspresikan melalui sinekdok, mentomoni, dan metaphor.

Sinekdok merupakan peleburan sebagian atau keseluruhan-keseluruhan atau mengacu kepada keseluruhan selain pada sebagainya. Sebagai contoh menggunakan istilah *the British, the American, and the Russian*. Istilah ini biasanya mengacu pada pemerintah atau kelompok tertentu dalam sebuah Negara bangsa. Berikutnya kiasan bisa menggunakan mentomoni, yakni menggunakan atribusi kata tambahan atau cirri yang berhubungan dengan benda yang maknanya mengacu pada benda itu sendiri. Meskipun pada dasarnya tidak perlu menghubungkan antar istilah yang akan menjadi acuan tersebut. Mentomoni ini secara nyata Nampak dalam dunia periklanan. Seringkali dalam iklan makna yang ingin ditampilkanya disajikan secara halus dan tersembunyi meskipun tidak ada hubungan yang begitu jelas dengan objek dalam iklan. Terakhir adalah metaphor. Cara ini juga dapat menyembunyikan relasi sosial dengan cara memberikan karakter tertentu kepada individu atau kelompok meskipun makna literar dari karakter tidak dimilikinya. Sebagai contoh perempuan besi pada Margareth Tacher.

Setrategi ketiga dalam mempertahankan relasi dominasi adalah dengan melakukan unifikasi. Praktik strategi ini adalah dengan cara mengkontruksi pada tataran simbol, bentuk penyatuan yang membawahi individu-individu dalam suatu identitas kolektif serta tidak mentolerir perbedaan dan perpecahan yang dapat

memisahkan mereka. Caranya dengan cara melakukan standarisasi. Dalam Negara tertentu, misalnya adanya usaha dalam menyatukan berbagai macam kelompok yang ada di dalam melalui penyatuan bahasa. Di sini pemerintah dengan otoritas yang dimilikinya membuat ketentuan-ketentuan baku agar kelompok manapun menggunakan bahasa nasional Negara. Cara ini—agar menyatukan semakin kuat—bisa dilanjutkan dengan melakukan simbolisasi dari kesatuan yakni, dengan cara mengkonstruksi simbol dari kesatuan identitas kolektif dan identifikasi yang bias menggabungkan sebuah kelompok atau pluralitas kelompok. Dalam suatu Negara misalnya terdapat bendera, lagu kebangsaan dan berbagai tanda lainnya.

Strategi keempat dalam mengukuhkan dominasi adalah dengan cara fragmentasi. Berbeda dengan unifikasi, strategi ini malah melakukan sebaliknya. Relasi dominasi ditegakan tidak dengan menyatukan individu-individu dalam satu kolektivitas, tetapi dengan mengkotak-kotakan individu dan kelompok yang dipandang memiliki kekuatan melawan kelompok dominan. Agar kondisi ini bisa tercipta, bisa diupayakan dengan menggunakan determinasi yaitu dengan menekankan ketidaksamaan perbedaan dan pertentangan diantara individu dalam kelompok sehingga sulit bersatu untuk melawan kelompok dominan. Maksud dari cara ini adalah melakukan pencitraan, dan mengancam di satu pihak. Sedangkan di pihak lain menuntuk persatuan di tiap-tiap individu.

Strategi terakhir untuk melakukan relasi dominasi adalah dengan menggunakan reifikasi (*reification*). Melalui strategi ini pihak yang berkepentingan dengan relasi dominasi berusaha menegaskan kesakralan sejarah. Sejarah kemudian tidak lebih dianggap sebagai benda atau peristiwa dari jenis kebiasaan tertentu sehingga karakter sosial dan historisnya hilang. Sedangkan konstruksi simbol dari strategi ini adalah dengan melakukan naturalisasi, eternalisasi dan nominalisasi, serta pasivisasi. Dengan naturalisasi suatu kreasi sosial dan historis diberlakukan sebagai peristiwa yang lazim atau sebagai hasil pasti dari suatu yang bersifat alamiah. Sedangkan dengan eternalisasi, fenomena sosial historis dihilangkan karakter historisnya dengan cara selalu digambarkan sebagai bersifat permanen, tidak berubah dan berulang. Adapun nominalisasi dan privatisasi merupakan cara menghilangkan aktor dan agen serta cenderung menghilangkan proses sebagai sesuatu atau peristiwa yang mengambil tempat subjek.

Fungsi Ideologi politik dan kaitannya dengan penegasan identitas digunakan untuk titik tolak dalam melakukan perubahan. Pada umumnya ideologi memiliki fungsi, sebagai berikut;

1. Struktur Kognitif, keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya.

2. Orientasi dasar yang membuka wawasan yang memberikan makna serta memberikan tujuan dalam kehidupan manusia.
3. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
4. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.
5. Kekuatan yang mampu memberi semangat dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.
6. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.<sup>54</sup>

#### **D. Proses Terbentuknya Ideologi Dan Ideologi Politik**

Dalam menelaah apa saja yang menjadi landasan terbentuknya ideologi maka harus difahami unsur-unsur dalam ideologi. Menurut pakar ilmu politik Roy C. Macridis sebagaimana yang dikutip oleh Syamsul Arifin ideologi memiliki kriteria yang terdiri dari empat aspek.<sup>55</sup>

Pertama, *comperhensivness*, maksudnya suatu ideologi harus memenuhi syarat menyeluruh dan luas. Dalam suatu ideologi yang matang (*a full-fledge*

---

<sup>54</sup> Soerjanto Poespowardoyo, "Pancasila Sebagai Ideologi Ditinjau Dari Segi Pandangan Hidup Bersama" dalam Oetoyo Osman dan Alfian, *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat* (Surabaya: Karya Anda, 1993) 48.

<sup>55</sup> Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praksis*, 44-45.





Berikutnya dalaha tahap *hortatory realism* (realism pendorong). Pada tahap ini dilakukan identifikasi antar teman dan musuh ideologis. Kemudian adalah tahap *practical realism* (realisme praksis) yakni terjadinya consensus dan integrasi.

Semua tahapan-bayangan ganda, ingatan selektif, ambang relatif, realism pendorong, fantasi politik, dan realism praksis, menurut Apter pada akhirnya bisa menimbulkan kesadaran pada komunitas ideologis. Kesadaran yang dimaksud Apter adalah kesadaran terhadap keluhan dan konflik secara bertahap diartikulasikan dengan cara sebegitu rupa sehingga isu-isu terpolarisasi dan menajam. Isu-isu bisa mewujudkan perasaan moral yang sangat kuat yang melekat pada identitas individu dan solidaritas komunitas. Ketika suatu ideologi bisa dikaitkan dengan pengertian-pengertian tersebut maka ia bisa menjadi factor dalam mengabsakan kewenangan. Jika tidak, tegar Apter, suatu ideologi hanyalah sekedar sekelompok gagasan tertentu tanpa mempunyai banyak konsekuensi.

#### **E. Keterkaitan Ideologi dan Sikap Politik**

Pengikut ideologi politik tertentu secara sadar akan melakukan suatu aksi atau movement/gerakan baik dalam hal penyebaran ide-ide sampai pada gerakan yang bersifat politik yaitu meraih kekuasaan dalam rangka mengatur kekuasaan sesuai dengan ideologi yang dianutnya. Inilah yang kemudian suatu ideologi menjadi motor penggerak suatu gerakan atau disebut sebagai gerakan politik.







(mendatangkan respon yang positif dari orang lain), maka akan semakin sering pula tindakan dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

2. Proporsi stimulus, jika suatu stimulus tertentu merupakan kondisi di mana tindakan seseorang mendapatkan ganjaran, maka semakin serupa stimulus yang ada dengan stimulus tersebut akan semakin besar kemungkinannya bagi orang itu untuk mengulang tindakannya seperti yang ia lakukan pada waktu yang lain.
3. Proporsi nilai; semakin bermanfaat hasil tindakan seseorang bagi dirinya, maka akan semakin besar kemungkinan tindakan tersebut diulangi. Proporsi rasionalitas yang merupakan kombinasi tiga proporsi yang ada menyatakan bahwa di dalam memilih suatu tindakan diantara alternative tindakan yang mungkin dilaksanakan, maka seseorang akan memilih tindakan yang paling menguntungkan, dilihat dari segi waktu, nilai hasil (V), dan perkembangan berdasar berbagai kemungkinan pencapaian hasil (P).
4. Proporsi kejenuhan –kerugian; semakin sering seseorang menerima ganjaran yang istimewa, maka ganjaran tersebut akan menjadi kurang bermakna.
5. Proporsi persetujuan –perlawanan.

- a. Jika seseorang tidak mendapat ganjaran seperti yang ia inginkan, atau mendapat hukuman yang tidak ia harapkan, ia akan menjadi marah dan akan semakin besar kemungkinan bagi orang tersebut untuk mengadakan perlawanan atau menentang, dan hasil dari tingkah laku semacam ini akan menjadi lebih berharga bagi dirinya.
- b. Bila tindakan seseorang mendatangkan ganjaran seperti yang ia harapkan bahkan berlebihan, atau tindakan tersebut tidak akan mendatangkan hukuman seperti keinginannya, maka kemungkinannya bagi orang tersebut untuk menunjukkan tingkahlaku persetujuan terhadap tingkahlaku yang dilakukan. Dan hasil tingkah laku semacam ini akan menjadi semakin berharga bagi dirinya.

Praktek perkembangan teori prilaku menyatakan bahwa sikap politik dipandang merupakan faktor yang ikut menentukan prilaku politik. Oleh karenanya banya teori yang mengkaji tentang sikap politik. Sebab dengan mengetahui sikap seseorang baik dalam politik ataupun yang lain maka akan dapat diramalkan prilaku tertentu orang tersebut.

Banyak teori yang mengatakan bahwa prilaku merupakan fungsi dari sikap. Tetapi tidak semua ahli sependapat dengan teori ini. Bahkan ada yang menunjukkan bahwa teori tersebut tidak selamanya benar. Artinya ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi keberlakuan teori ini. Kelemahanya terletak pada penentuan ukuran sikap tidak valid, karena ukuran sikap sudah diplot







oleh Kartosuwiryo, Kahar Muzakkar, dan Daud Beureueh beserta teman-temannya atas ideologi politik yang mendasarinya.

Seperti dikatakan oleh Syari'ati,<sup>70</sup> menandakan bahwa Ideologilah yang senantiasa mengilhami dan memimpin serta mengorganisasi perjuangan peperangan, pemberontakan dan pengorbanan yang luar biasa sepanjang sejarah kemanusiaan. Sifat dan keharusan ideologi meliputi keyakinan, tanggung jawab, keterlibatan dan komitmen.

Ideologi agama adalah keyakinan yang secara sadara dipilih untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada. Ideologi mengarahkan suatu masyarakat atau suatu bangsa untuk mencapai tujuan dan ideal-ideal yang mereka cita-citakan. Yang untuk tujuan dan ideal mereka rela berjuang dan bertempur.<sup>71</sup>

Ideologi politik mampu membius dan menuntun pengikutnya untuk bersikap politik dan bahkan mampu menjadi pijakan untuk bergerak dan berjaung demi apa yang dicita-citakan atas idealisme ideologi politik itu sendiri.

Setali dengan Ernest Renan, yang dikutip oleh Adyaksa bahwa ideologi memiliki elemen fungsi yang pasti, adalah adanya suatu cara pandang dalam memandang dunia secara ideal dan sekaligus menuntut adanya pengorbanan dari mereka yang meyakini bahwa manakala ideologi tersebut ingin diwujudkan secara nyata.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Ali Syari'ati, *Ideologi Kaum Intelektual: Satu Wawasan Islam*, Diterjemakan Oleh Farid Gaban (Bandung: Mizan, 1994) 78.

<sup>71</sup> *Ibid.*, 88.

<sup>72</sup> Adyaksa Dault, *Islam dan Nasionalisme*, 54.











Bersenjata RI terbentuk) membuat siaran/pengumuman panggilan masuk kemiliteran RI pertama, disini Bung Tomo membuat redaksionalnya oleh Muljoto (Brigjenn TNI Purn. Dr. Muljoto).

#### **D. Tugas dan Pengalaman Khusus**

Setelah kemerdekaan Indonesia, Sutomo sempat terjun dalam dunia politik pada tahun 1950-an, namun ia tidak merasa bahagia dan kemudian menghilang dari panggung politik. Pada akhir masa pemerintahan Soekarno dan awal pemerintahan Suharto yang mula-mula didukungnya, Sutomo kembali muncul sebagai tokoh nasional.

Padahal, berbagai jabatan kenegaraan penting pernah disandang Bung Tomo. Ia pernah menjabat Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata/Veteran sekaligus Menteri Sosial *Ad Interim* pada 1955-1956 di era Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Bung Tomo juga tercatat sebagai anggota DPR pada 1956-1959 yang mewakili Partai Rakyat Indonesia.

Namun pada awal 1970-an, ia kembali berbeda pendapat dengan pemerintahan Orde Baru. Ia berbicara dengan keras terhadap program-program Suharto sehingga pada 11 April 1978 ia ditahan oleh pemerintah Indonesia yang tampaknya khawatir akan kritik-kritiknya yang keras. Baru setahun kemudian ia dilepaskan oleh Suharto. Meskipun semangatnya tidak hancur di dalam penjara, Sutomo tampaknya tidak lagi berminat untuk bersikap vokal.



Abdul Rachman, dan Ngaleh dari Pemuda Republik Indonesia, Surabaya Utara), bahwa tentara Sekutu/Inggris mulai menembak dan bergerak diluar daerah pelabuhan, maka pada tanggal 10 november 1945 pagi, melalui pidato perjuangan di radio BPRI (Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia), atas nama rakyat Indonesia di Surabaya dan Jawa Timur menyatakan perang. Demikian kesatuan-kesatuan bersenjata RI besama seluruh rakyat pejuang di Surabaya membalassserangan tentara Sekutu/Inggris.

Tentara Sekutu/Inggris adalah kesatuan elit militer yang terlatih dan terbiasa di medan pertempuran saat perang dunia II, tetapi perlawanan rakyat surabaya selama beberapa minggu telah menimbulkan kecurigaan yang tak ternilai harganya. Hal tersebut membuktikan bahwa semangat juang bangsa Indonesia meskipun dengan persenjataan yang sederhana, telah menunjukkan harga dirinya di mata dunia internasional.

Meskipun Indonesia kalah dalam pertempuran 10 November itu, kejadian ini tetap dicatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Indonesia. Tanggal 10 november pun dijadikan hari pahlawan Nasional.

#### **E. Karir kenegaraan**

- 1) Menjadi menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata/Veteran/Menteri Sosial *ad Interen* (1955-1956)
- 2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia hasil pemilu umum pertama(1956-1959)



- 3) **Bintang Gerlilya**
- 4) **Dan Bintang Veteran Republik Indonesia**
- 5) **SK Pensiun Bekas Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang dan menteri Sosial**  
*ad Intern*
- 6) **SK Pensiun Bekas Anggota ABRI (Mayor Jendral TNI AD)**
- 7) **Dan SK Pensiun bekas anggota DPR**







cengkraman penjajah dan merebut kemerdekaan yang didamba-dambakan demi terwujudnya keadilan sosial yang adil beradab. Keadaan seperti itulah mampu menjadi alasan dan dorongan yang ampuh bagi seseorang untuk bertindak dan berfikir atas situasi yang dialami. Hal itu pula yang menjadi alasan tumbuhnya rasa nasionalisme,<sup>4</sup> dikatakan bahwa kolonialisme adalah antithesis dari sikap nasionalisme. Meskipun demikian, nasionalisme bukan hanya sebagai antithesis dari kolonialisme saja. Sebab setelah kemerdekaan rasa nasionalisme tersebut masih utuh dan berkembang. Rasa nasionalisme Bung Tomo bisa ditelaah dari sikap Bung Tomo yang secara lantang dan konsisten dalam mempertahankan kemerdekaan, dengan perannya dalam pertempuran 10 November 1945.

Semangat nasionalisme dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya tersebut bisa dikategorikan sebagai cerminan atas tumbuh kembangnya rasa nasionalisme yang didorong atas iklim sosial politik pada saat itu. Peristiwa itu sangat erat kaitanya dengan perjuangan fisik dan bahkan perjuangan senjata. Salah satu peristiwa perjuangan yang tidak lepas kaitanya terhadap usaha mempertahankan kemerdekaan dengan peristiwa 10 November 1945. Maka ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi.

*Pertama*, dalam peristiwa tersebut mengandung nilai kejiwaan yang luhur, karena peristiwa tersebut melandaskan pada sifat perjuangan yang tidak mengenal menyerah dan tanpa pamrih sesuai panggilan dan tuntutan hati nurani seluruh rakyat Indonesia. *Kedua* peristiwa tersebut juga melandaskan

---

<sup>4</sup> Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai kemerdekaan jilid 1* (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2008) 6-7.

pada semangat 17 Agustus 1945, yang pada dasarnya merupakan pencerminan falsafah pancasila sebagaimana tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>5</sup>

Sikap heroik para pejuang dalam peperangan 10 November 1945 di Surabaya tersebut patut dijadikan teladan yang baik untuk mendorong rasa kecintaan dan semangat jiwa muda bangsa Indonesia. Sebab, cerminan sepirit perjuangan yang secara seponan berlangsung dari para pejuang baik yang berasal dari arek-arek Surabaya maupun penduduk sekitar yang bukan berasal dari Surabaya. Mereka tumpah ruah bersatu dengan satu komando melawan penjajah yang ingin kembali menegakan kolonialisme di kota Surabaya. Para pejuang yang sebelumnya tidak pernah mendapat latihan militer secara khusus, yang harus melawan prajurit bersenjata lengkap.<sup>6</sup>

Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945 tersebut, meskipun tidak terjadi kemenangan di pihak Indonesia pada saat itu namun karena melihat unsur patriotik yang terkandung dalam peristiwa itu. Maka, dengan penetapan Surat Pemerintah Republik Indonesia Nomer 9/um/th 1946 telah ditetapkan peristiwa 10 November adalah sebagai hari pahlawan. Karena hari dan peristiwa 10 November 1945 terjadi di Surabaya, sehingga Surabaya mendapat predikat sebagai kota pahlawan. Departemen Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia tanggal 23 September 1986 nomer 1572/G/FS.2/86 meneguhkan predikat kota Surabaya sebagai kota pahlawan,

---

<sup>5</sup> Harmoko, "Pengukuhan Hari Pahlawan", Dalam H. L. Irsan Radjamin S. (editor), *Peristiwa 10 November 1945 dalam Lukisan* (Surabaya: PT Enka Parahiyangan, 1988) 8.

<sup>6</sup> Soejipto Hardjosoediro, *Dari Proklamasi ke Perang Kemerdekaan* (Jakarta: Balai Pustaka, 1987) 59-78













## **b) Pada Era Pemerintahan**

Bung Tomo berkecimpung dalam bidang media masa sebagai wartawan dan penulis bebas di berbagai surat kabar dan majalah pada Jamanya. Dengan tulisan-tulisan itulah dia mengeluarkan ide-ide politik dan gagasan yang dimilikinya yang dirasa tidak berpihak pada rakyat dan semacamnya. Bukan hanya keterbukaan dan kelugasan Bung Tomo dalam mengkritik pemerintahan dalam negeri saja seperti; Nota 10 November yang dikirimkan pada tanggal 17 November 1956 yang dilayangkan kepada Presiden RI pada saat itu, Bung Tomo pun megirimkan Nota itu pada Pemimpin-Pemimpin Indonesia, Perwira-perwira, dan Pemuda-pemuda Indonesia. Nota 10 November tersebut ditulisnya dalam kapasitasnya sebagai salah satu Anggota DPR RI.

Dengan tegas Bung Tomo dalam nota 10 November tersebut menulis; *Sesudah "Nota 10 November" ini, saya akan mengambil langkah-langkah yang diizinkan oleh demokrasi untuk melaksanakan segala sesuatu yang saya kemukakan dalam nota 10 November itu.*

Tulisan yang lantang tersebut dilampirkanya dalam analisis dan pemaparan kasus yang terjadi pada saat itu. Bukan hanya itu, dia juga menganalisis dan sekaligus mencoba menawarkan solusi. Inti dari Nota 10 November itu adalah ketegangan antara Angkatan Darat Republik Indonesia dan Kaum Politikus. Terdapat kurang lebih tujuh poin yang ditawarkan oleh Bung Tomo dalam memperbaiki keadaan tersebut. Sebagaimana kata Bung Tomo untuk menghimbau seluruh pihak untuk kembali bersatu, bersatu untuk

menyelamatkan keadaan sosial politik pemerintahan untuk kembali dalam suasana sehat.

Dari sis tujuh point itu terlihat bahwa Bung Tomo ingin menyelamatkan Indonesia, dengan keinginan menegakan kembali keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kekeritisan Bung Tomo itupun berlanjut bukan hanya pada masa pemerintahan Soekarno namun juga pada pemerintahan Soehato. Yang pada dua periode kepemimpinan dari dua presiden Negara tersebut Bung Tomo termasuk dalam sistem pemerintahan. Artinya Bung tomo dalam sistem lembaga politik, birokrasi yang mencoba untuk merespon kebijakan sistem politik Indonesia.

Sebagaimana diketahui sistem politik Indonesia dibentuk untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan mencapai tujuan nasional, maka sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, pemerintah Republik Indonesia dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan apratur Negara serta segenap dana dan daya, demi terciptanya tujuan nasional, dan terlaksananya tugas Negara sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945.<sup>16</sup>

Suasana pemerintahan saat itu yang tidak mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan cita-cita pancasila, menelisik hati nurani Bung Tomo. Kebenranian Bung Tomo dalam mengkoreksi kebijakan pemerintah Soekarno tersebut dimaulai dengan Nota 10 November 1956, surat

---

<sup>16</sup> Inu Kencana Syafii dan Azhari SSTP, *Sistim Politi Indonesia: Era Soekarno, Hatta Syahrir, Aidit, Syafruddin, Era Soeharto, Moerdani, Wiranto, Harmoko, Habibie, Era Gus Dur, Megawati, Amin Rais, Hamzah Haz, Era SBY, Kalla, Baasyir* (Bandung: Reflika Aditama, 2009) 5.







Analisis Adinugeroho adalah ketidak sukaan Bung Karno atas Bung Tomo ketika pidato Bung Tomo tentang membawa bendera putih.<sup>21</sup> Sedangkan bunyi pidato Bung Tomo pada sore itu adalah “*Dengan sangat saya minta agar generasi muda Indonesia manapun juga, menolak untuk membawa bendera putih menyerah kepada musuh*”. Padahal anjuran demikian itu hanyalah untuk kejayaan RI semata, dan tidak ada maksud untuk menyinggung peristiwa yang pernah terjadi. Sebab peristiwa Bung Karno menyerah dengan membawa bendera putih tersebut sudah dilupakan oleh rakyat banyak, dan Rakyat Indonesia bersama ABRI-nya tetap berjuang terus dan mencapai kemenangan pada akhirnya.

Kekritisan Bung Tomo pun masih berlanjut pada Orde Baru, dimulai dengan Surat Terbuka yang dilayangkan kepada Presiden RI, Soeharto kala itu pada 4 Desember 1972. Hingga tulisan pertanggung jawabannya sebagai Ketua II Markas Besar Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia yang meliputi bidang ideologi sosial politik dan sebagai Anggota Dewan paripurna Angkatan 45.

Keterusterangan Bung Tomo kemudian dihadahi dengan penagkapannya dan kemudian dipenjarakan selama satu tahun oleh Orde Baru tahun 1978-1979. Masalah-masalah yang disoroti dengan tajam oleh Bung Tomo saat itu meliputi masalah kebijakan sosial dan hingga skandal ekonomi Cendana dengan cukong Cina, Liem Swie liong dan lain-lain.

---

<sup>21</sup> Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi RI pernah menyerah Kepada Tentara Belanda di Yogyakarta dan kemudian membawa bendera putih. Presiden yang membawa kendaraan tentara aggressor itu dipotret oleh Belanda kemudian foto itu disebarakan kemana-mana.





dan bahkan semakin kuat. Terbukti dengan sikap politik dan berujung pada perilaku politik yang di tempuh oleh Bung Tomo, semata-mata untuk kejayaan Republik Indonesia dan tercapainya cita-cita bangsa. Dia bisa merasakan bahwa bangsanya belum terbebas sepenuhnya dari kolonialisme, namun ciri-ciri kolonialisme masih dirasakan. Sehingga dia menyebut bahwa negaranya masih mengalami jaman penjajahan baru yang disebut neokolonialisme atau nikolin.

Nasionalisme adalah manifestasi kesadaran bernegara atau semangat bernegara. Sikap Bung Tomo bisa dikatakan sebagai salah satu indikator bagaimana semangat bernegara itu berkembang di Indonesia.

## **2. Lingkungan Sosial Politik Langsung**

Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan. Dari sisi aktor mengalami sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat, termasuk nilai dan norma kehidupan bernegara dan pengalaman-pengalaman hidup pada umumnya. Lingkungan langsung ini dipengaruhi oleh lingkungan tak langsung.

Bung Tomo dilahirkan dari kalangan keluarga yang serba pas-pasan. Bung Tomo juga dikatakan memiliki pertalian darah dengan beberapa pendamping dekat Pangeran Diponegoro yang dikebumikan di Malang. Hal itu dilacak dari pengakuan ayahnya, Kartawan Tjiptowidjojo.



Meskipun Bung Tomo bukan merupakan alumni dari Ampel ataupun dari Plampitan yang notabene kalangan santri. Namun dalam perkembangannya tidak sedikit yang mengatakan bahwa Bung Tomo seorang yang religius.

Hal itu bisa dilihat dari sikap Bung Tomo yang selalu menggunakan falsafah Allahu Akbar dalam setiap tindakan sosialnya. Allahu Akbar yang dikumandangkan oleh Bung Tomo mampu memberikan semangat layaknya mesin yang mendapat bahan bakar yang bisa berjalan. Sebab dengan ucapan Allahu Akbar, mampu menumbuhkan keberanian yang berlipat ganda, percaya sepenuhnya terhadap kebesaran Allah dan pertolongan-Nya. Dan menganggap kekuatan yang sedang dihadapi menjadi kecil betapapun besar dan kuatnya.<sup>26</sup>

Atas pekikan Allahu Akbar yang di ucapkan oleh Bung Tomo bisa dilihat dalam sudut pandang, interaksionalisme simbolik prespektif Herbert Blumer,<sup>27</sup> manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang diberikan kepada sesuatu tersebut.

Makna tentang sesuatu tersebut diperoleh, dibentuk, atau direvisi melalui proses interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Pemaknaan terhadap sesuatu dalam bertindak atau berinteraksi tidak berlangsung mekanistik, tetapi melibatkan proses interpretasi, pemaknaan bersifat situasional. Sehingga tindakan manusia tidak dapat disederhanakan sebagai akibat tuntutan struktur sosial. Analisis makna berlangsung pada tingkat interaksi. Keadaan tersebut bisa dilihat ketika memahami bahwa kebanyakan pejuang yang ikut terjun

---

<sup>26</sup> Yunan Nasution, "Falsafah Allahu Akbar" Dalam Hamdy El Gumanti (Penyunting), *Selamat Jalan Bung Tomo* (Jakarta: Aksara Agung, 1982) 99-100.

<sup>27</sup> Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2007) 258-259.

















dengan semangat primordialisme kebangsaan (nasionalisme). Skriptual ideologis, yakni pemahaman yang skriptual dan ideologis. Dengan skriptual dimaksudkan keberagamaan lebih menerapkan pada arti harifah teks agama. Segala macam penafsiran, apalagi yang bersifat aqliyah, ditolak karena dikhawatirkan dapat mengurangi kemutlakan teks agama. Sedangkan dikatakan ideologis, karena keberagamaan ini menuntut dijadikannya agama sebagai ideologi menggantikan ideologi-ideologi sekuler lainnya.

Bung Tomo selain terlihat sangat konsisten dalam sikap nasionalisnya, namun dia juga sangat religius. Tetapi Bung Tomo sangatlah Rasional dalam bersikap dan perilaku politik. Sehingga pantaslah jika penulis simpulkan bahwa ideologi politik Bung Tomo adalah Ideologi nasionalis-religius. Dan bukan Nasionalis-Islam, yang mendasarkan bahwa Islam sebagai Ideologi Politik dan konsekuesi dari ideologi Islam tersebut mengharuskan Islam sebagai acuan untuk membuat dan melaksanakan konstitusi Negara secara resmi. Yakni membentuk Negara silam misalnya.

Ideologi politik Bung Tomo berbeda dengan ideologi Soekarno yang Soialis-religius, ataupun Kartosuwirjo yang menjadikan Islam sebagai ideologi politiknya. Kartosuwiryo dan Mohammad Natsir meskipun memiliki pijakan berfikir yang sama, yakni Islam namun memiliki perbedaan pendapat atas ideologi politik berbangsa. Ideologi politik Mohammad Natsir yang lebih kepada Nasonalis-Muslim. Ideologi Natsir bisa dilihat dari pendapatnya terhadap penafsiran Pancasila, dia meganggap bahwa pancasila adalah sekuler. Dia menganjurkan agar Islam menjadi dasar Negara, sebab dalam Islam juga











pada orang tua angkatnya yang berkebangsaan Belanda, dalam biayanya meneruskan studinya di Belanda tersebut malah memilih untuk berjuang memerdekakan bangsanya dari cengkraman kolonialisme. Sikap politik yang diambil adalah dia menolak tawaran tersebut.

Jika saja dia menerima tawaran mngajar tersebut, maka dia akan bisa menabung untuk melunasi hutang-hutangnya. Namun, hingga akhir hayatnya dia tak kunjung melunasi hutang-hutangnya tersebut. Tan malaka juga bernasib sama seperti pahlawan-pahlawan bangsa lainya tersingkir dalam memenangkan gagasan politiknya. Sejarah berusaha mengkelamkan namanya. Buktinya hingga kini tidak diketemukan kuburan Tan Malaka.

Bung Tomo dalam mengaplikasikan ideologi politik tidak lantas membentuk sebuah wadah pergerakan. Baik berupa partai politik atau organisasi pemberontakan. Bung Tomo cendeung bersikap politik non partai ataupun tidak memiliki afiliasi politik dengan organisasi sosial kemasyarakatan seprti NU ataupun Muhamadiyah.

Sikap Bung Tomo bisa dikatakan sebagai tataran ide-ide politik ataupun pemikiran politik. Meskipun, tidak sepenuhnya hanya merupakan ide-ide atau gagasan saja. Sebab, kenyataanya Bung Tomo juga ikut dalam dinamika politik bangsa, pernah juga menjadi Menteri Negara. Meski demikian, tidak bisa dikesampingkan bahwa ideologi nasional-religius menjadi landasan dan penggerak sikap dan prilaku politik Bung Tomo. Dengan ruang ekspresi dalam bentuk tulisan dan pandangan objektif Bung Tomo atas realitas bangsa.









- Kencana, Inu Syafii dan Azhari SSTP, *Sistim Politi Indonesia: Era Soekarno, Hatta Syahrir, Aidit, Syafruddin, Era Soeharto, Moerdani, Wiranto, Harmoko, Habibie, Era Gus Dur, Megawati, Amin Rais, Hamzah Haz, Era SBY, Kalla, Baasyir*, Bandung: Reflika Aditama, 2009.
- Kuntowijoyo, "Nilai-nilai Ideologi Pancasila" Dalam Riza Noer Arfani (ed.) *Demokrasi Indonesia Konteporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung Misan, 1997.
- Larrain, Jorge, *Konsep Ideologi*, Diterjemahkan Oleh Ryadi Gunawan (Yogyakarta: LKPSM, 1996.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Kemoderenan Dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1993.
- Mas'ud, Masdar F, "Islam dan Negara kebangsaan" Dalam, *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia* (Bandung Pustaka Hidayah, 1999.
- Miles, Mattew & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan jetjep Rohendi, Jakarta: UI Perss, 1992.
- Menheim, Karl, *Ideology And Utopia: An Introduction To The Sociology Of Knowledge*, New York:Harcout Brace and Company, 1936.
- Mennheim, Karl, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, Diterjemahkan F. Budi Hardiman, Jogjakarta: Penerbit Kanisus, 1991.
- Moleong, J. Lexi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhaimin, Yahya A. "Ideologi, Idealisme, dan Integrasi Nasional" Dalam *Masalah- Masalah Pembangunan Politik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1976.
- Muljana, Slamet, *Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai kemerdekaan jilid I*, Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara, 2008
- Nasution, Yunan. "Falsafah Allahu Akbar" Dalam, *Selamat Jalan Bung Tomo* Jakarta: Aksara Agung, 1982.

- Nasir, Haedar, *Meneguhkan Ideologi gerakan Muhammadiyah*, Malang: UMM Press, 2006.
- Poespowardoyo, Soerjanto, "Pancasila Sebagai Ideologi Ditinjau Dari Segi Pandangan Hidup Bersama" dalam Oetojo Osman dan Alfian, *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat*, Surabaya: Karya Anda, 1993
- Partanto, A. Pius, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Poloma, Margaret M., *Sosiologi Konteporer*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2007.
- Poeze, Harry A., *Pergulatan Menuju Republik Tan Malaka 1925-1945*, Diterjemahkan Oleh Pustaka Utama Grafiti, Jakarta: PT. Temprint, 1999.
- Rahman, Arifin, *Sistem Politik Indoneisa: dalam prespektif structural dan Fungsional*, Surabaya: Penerbit SIC, 1998.
- Riberu, J. dkk., *Menguak Mitos-Mitos Pembangunan: Telaah Etis Dan Kritis*, Jakarta: Gramedia, 1986.
- Riff, A. Michael, *Kamus Ideologi Politik Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Roger, Eatwell and Anthony Wright (eds.), *Contemporary Political Ideologies*, London and New York: Pinter, 1999.
- Rosyada, Dede, *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, Hakasasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenda Media, 2005.
- Santoso, Listiyono, *Teologi Politik Gus Dur*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Jogjakarta, 2004.
- Sargent, Lyman Tower, *Contemporary Political Ideologies: A comperative Analysis*, USA: The Dorsey Press Homewood Illinois, 1981.
- Sheperd, Wiliam E Islam and Ideologi: Toward Typology, Dalam Safiq Mughni (ed.), *An Anthology of Conteporary Middle East History*, Quebec Canada: Conundrum Press, 2000.
- Simon, Roger, *Gagasan-Agasan Politik Gramsci*, Diterjemahkan Oleh Kamdani Dan Imam Baehaqi, Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offest, 1999.

- Syah, Rahim. *Kisa Para Pahlawan-pahlawan Bangsa: Penunjang Pelajaran IPS*, Surabaya: Indah Surabaya, 2005
- Syari'ati, Ali, *Ideologi Kaum Intelektual: Satu Wawasan Islam*, Diterjemakan Farid Gaban, Bandung: Mizan, 1994.
- Syariati, Ali *Tugas Cendekiawan Muslim*, Diterjemahkan Oleh Amin Rais, Jakarta: Lentera, 1996.
- Soeroto, A, *Dr Soetomo: Peletak Batu Pertama Cita-cita Indonesia Raya*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985.
- Sugiyono, *Metde Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2009.
- Supriyanto, Eko, *Sosialisme Islam: Pemikiran Ali Syari'ati*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003.
- Sutomo, Sulistina, *Bung Tomo Suamiku: Biara Rakyat yang Menilai Kepahlawananmu*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Sutrisno, Slamet, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1992.
- Suseno, Franz Magnis, *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Thompson, B. Jhon, *Analisis Ideologi: Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia* Diterjemahkan Oleh, Yogyakarta: Ircisod, 2003.
- Tomo, Bung (Sutomo), *Pertempuran 10 November 1945: Kesaksian dan Pengalaman Seorang Aktor Sejarah*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Tomo, Bung (Sutomo), *Menembus Kabut Gelap Bung Tomo Menggugat: Pemikiran, Surat, dan Artikel Politik (1955-1980)*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Wardjaya, Baskara T. *Bung Karno Menggugat: Dari Marhaen, Cia Pembantaian Maissal '65 Hingga G 30 SPKI*, Jakarta : Galang Press, 2008.



